PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

PEKERJAAN :
PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

DENGAN

DIREKTUR
PT. MANIK SEKECAP KARYA

NOMOR	:	**B.25.600.1.15.2/5028/CK/DISPUPR.PERKIM (PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK)** **024/07/MSK/IV/2026 (PENYEDIA)**
TANGGAL	:	**28 APRIL 2026**
NILAI KONTRAK	:	**Rp. 49.229.928.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)**

TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 28 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/5031/CK/DISPUPR.PERKIM
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permakluman**

Yth. Bupati Karangasem
di -
Tempat

Sehubungan telah ditetapkannya:

1. Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK):
   Nomor : **B.25.600.1.15.2/5028/CK/DISPUPR.PERKIM (PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK)**
   024/07/MSK/IV/2026 (PENYEDIA)
   Tanggal : 28 April 2026

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) :
   Nomor : **B.25.600.1.15.2/5029/CK/DISPUPR.PERKIM**
   Tanggal : 28 April 2026

Pembangunan Paket Pekerjaan **PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)** yang dikerjakan oleh Penyedia PT.MANIK SEKECAP KARYA, bersama ini kami permakluman bahwa pekerjaan tersebut segera dimulai.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, ST.,MT
NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPRKIM Provinsi Bali (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
3. Camat Rendang, untuk permakluman;
4. Kapolsek Kecamatan Rendang, untuk permakluman;
5. Perbekel Desa Besakih, untuk permakluman;
6. Bendesa Adat Desa Besakih, untuk permakluman;
7. Arsip.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883.
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA LOKASI

Nomor : B.25.600.1.15.2/5030/CK/DISPUPR.PERKIM

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam,** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **I Made Mahardika, ST.,MT.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
Alamat : Jalan Beliton No.2 Denpasar
Selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

II. Nama : **Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM**
Jabatan : Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA
Alamat : Jl. Blumbungan Br. Parekan, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Badung
Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: B.25.600.1.15.2/4753/CK/DISPUPR.PERKIM tanggal 22 April 2026;
2. Surat Perintah (Kontrak):

NOMOR : **B.25.600.1.15.2/5028/CK/DISPUPR.PERKIM (PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK)**
024/07/MSK/IV/2026 (PENYEDIA)

TANGGAL : **28 April 2026**

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK menyerahkan kepada **PENYEDIA** dan **PENYEDIA** menerima dari **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** lokasi pekerjaan untuk:

1. Pekerjaan : "PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)"
2. Lokasi : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kab. Karangasem

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA PT. MANIK SEKECAP KARYA	**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM Direktur	**I Made Mahardika, ST.,MT.** NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali (sebagai laporan);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
3. Arsip.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : B.25.600.1.15.2/5029/CK/DISPUPR.PERKIM

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **I Made Mahardika, ST.,MT.**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

Alamat : Jalan Beliton No.2 Denpasar

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**.

Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) :

NOMOR : **B.25.600.1.15.2/5028/CK/DISPUPR.PERKIM (PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK)**
024/07/MSK/IV/2026 (PENYEDIA)

TANGGAL : **28 April 2026**

Dengan ini memerintahkan :

Nama : **Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM**

Alamat : Jl. Blumbungan Br. Parekan, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Badung

Jabatan : Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA

Dalam hal ini selaku wakil sah dari PT. MANIK SEKECAP KARYA

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan : "PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA) "
2. Tanggal Mulai Kerja : 28 April 2026
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian (KONTRAK)

4. Waktu Penyelesaian : Selama 210 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal 28 April 2026 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2026

5. Hasil Pekerjaan : "PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUC BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATU LAWA)"

6. Sanksi : Apabila Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP), maka Pihak Kedua dapat dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari harga Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK).

Menerima dan menyetujui

PENYEDIA	**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
PT. MANIK SEKECAP KARYA	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
	Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
	(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM	**I Made Mahardika, ST.,MT.**
Direktur	NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan kepada, Yth :
1. Pengguna Anggaran pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali (sebagai laporan);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
3. Arsip.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BALI
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

DENGAN

DIREKTUR
PT. MANIK SEKECAP KARYA

NOMOR : **B.25.600.1.15.2/5028/CK/DISPUPR.PERKIM** (PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK)
024/07/MSK/IV/2026 (PENYEDIA)

TANGGAL : **28 April 2026**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Denpasar**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : **I Made Mahardika, ST., MT**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah) selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak
Alamat : Jalan Beliton Nomor 2, Denpasar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor : B.25.100.3/4702/SEKRET/DISPUPR.PERKIM, tanggal 14 April 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: B.25.100.3/125/SEKRET/DISPUPR.PERKIM tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Bidang Cipta Karya, selanjutnya disebut: **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**.

2. Nama : **Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM**
   Jabatan : Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA
   Alamat : Jl. Blumbungan Br. Parekan, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Badung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. MANIK SEKECAP KARYA** beralamat di Jl. Blumbungan Br. Parekan, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal Badung berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 16 Tanggal 19 Nopember 2024 Notaris Ni Luh Amik Muryatini, SH. alamat Jl. Raya Padang Luwih Pertokoan Sutramas Blok A1 Badung yang selanjutnya disebut: **PENYEDIA.**

Dan dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Bertahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia;

10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
12. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR;
13. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Tertib Evaluasi Kewajaran Harga;
14. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi dan Teknis;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/DK/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026;
19. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Sektoral Bali Tahun 2026;
20. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Bali No. DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April 2026;
21. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Bali Nomor: B.25.100.3/4702/SEKRET/DISPUPR.PERKIM tentang Penetapan/Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2026;
22. SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung;
23. SKSNI T-15-1991-03 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.
24. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971);
25. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);
26. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 1982);
27. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
28. Peraturan-peraturan terkait lainnya di Indonesia mengenai pengarahan tenaga kerja.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a. Telah dilakukan proses pemilihan PENYEDIA yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
b. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK telah menunjuk PENYEDIA menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan PENYEDIA Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)**, sebagaimana

diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

c. PENYEDIA telah menyatakan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

d. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat para pihak;

e. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan Perjanjian Kerja melaksanakan **Pekerjaan "PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (Pura Catur Lawa)"** pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian (KONTRAK) ini.

Pasal 2
TUJUAN KONTRAK

Tujuan Perjanjian Kerja ini, untuk melaksanakan pekerjaan hasil tender **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)**, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sumber dana APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 yang tertuang di dalam DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

A. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

B. Pura Ida Ratu Pande
   I. Pekerjaan Penataan Halaman
C. Pekerjaan Toilet, Gudang dan Bale Pesandekan
   I. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
   II. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
D. Pura Ida Ratu Penyarikan
   I. Pekerjaan Penataan Halaman
   II. Pekerjaan Candi dan Penyengker
   III. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
   IV. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
E. Pura Ida Ratu Pasek
   I. Pekerjaan Penataan Halaman
   II. Pekerjaan Wantilan
   III. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah
   IV. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
   V. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
F. Pura Ida Ratu Dukuh
   I. Pekerjaan Penataan Halaman
   II. Pekerjaan Toilet dan Pewaregan
   III. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
   IV. Pekerjaan Candi dan Penyengker
   V. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
G. Pura Ida Ratu Dukuh Pesimpenan
   I. Pekerjaan Penataan Halaman
   II. Pekerjaan Dapur dan Toilet
   III. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
   IV. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing

Pasal 4
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati dan tercantum didalam B.A. Persiapan penandatanganan kontrak sebesar **Rp. 49.229.928.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan kode rekening 1.03.09.1.01.0019.5.1.05.05.001.00002 untuk Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan **"PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)"**, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumah an dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali No. DPPA/A. 2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April 2026 Tahun

Anggaran 2026 sudah termasuk semua jenis pajak serta segala jenis pengeluaran PENYEDIA.

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG UTAMA DENPASAR (011)** dengan No. Rekening [redacted] **1** atas nama **PT. MANIK SEKECAP KARYA.**

(4) Apabila adanya *refocussing* anggaran yang mengakibatkan paket pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan, maka PENYEDIA tidak bisa menuntut ganti rugi dan anggaran untuk pembayaran pekerjaan ini sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketersediaan anggaran.

(5) Kontrak didasarkan atas sistem Harga Satuan (*Unit Price*) dan Harga satuan mengikat (*Fixed Unit Price*) seperti tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Pasal 5
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :
   a. addendum kontrak (apabila ada);
   b. surat perjanjian;
   c. daftar kuantitas dan harga surat penawaran;
   d. syarat-syarat umum kontrak
   e. syarat-syarat khusus kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Kerja),
   f. spesifikasi teknis,
   g. gambar-gambar; dan
   h. dokumen lainnya seperti Surat Keputusan Pemenang, Surat Penunjukan PENYEDIA Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a. Adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian Kerja;
   c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
   d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
   e. Surat Penawaran;
   f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   h. Spesifikasi teknis;
   i. Gambar-gambar; dan
   j. Dokumen lainnya seperti Jaminan-jaminan, SPPBJ, B.A. Hasil Pemilihan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemilihan.

(3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Pasal 6
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, yaitu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 7
DIREKSI PEKERJAAN

(1) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.
(2) Direksi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
    a. memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan;
    b. mengingatkan PENYEDIA jasa konstruksi yang berkontrak dengan PPK untuk melaksanakan konstruksi sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dan tertuang dalam dokumen kontrak, mendukung dan membantu tugas PPK terhadap kegiatan paket pekerjaan, memeriksa kelengkapan administrasi pekerjaan dan membantu kelengkapan administrasi untuk proses pencatatan aset.
(3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Direksi Pekerjaan bekerja sama dengan Konsultan Pengawas.

Pasal 8
PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB

(1) Pengendalian atas penyelenggaraan pekerjaan dilakukan oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.
(2) PENYEDIA harus menyampaikan secara tertulis Struktur Personil Manajerial untuk diketahui oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.
(3) Dalam hal penggantian Struktur Personil Manajerial PENYEDIA wajib mendapat persetujuan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.
(4) Untuk keperluan pengendalian pekerjaan PENYEDIA harus membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik harian, mingguan dan bulanan.
(5) Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
(6) Kontrak kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu :
    a. rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 0% - 70% (nol persen sampai tujuh puluh persen) dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan dengan rencana lebih besar 10%;
    b. rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 70% - 100% (tujuh puluh persen sampai seratus persen) dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan dengan rencana lebih besar 5%; dan
    c. rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 70% - 100% (tujuh puluh persen sampai seratus persen) dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik

pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Pasal 9
P A J A K

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak – pajak lain dan bea meterai yang berhubungan dalam pekerjaan ini menjadi tanggungan PENYEDIA yang sudah termasuk dalam nilai pekerjaan (Kontrak) ini.

Pasal 10
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang Muka
   1. PENYEDIA berhak mengambil Uang Muka maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak yaitu **20% (dua puluh persen)** x **Rp. 49.229.928.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)= Rp. 9.845.985.600,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)** yang dibayarkan dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan setelah PENYEDIA menyerahkan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK Surat Jaminan uang muka, yang harus diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah/Jamkrida Provinsi Bali, besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Uang Muka yang diberikan.
   2. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka **224 (dua ratus dua puluh empat)** hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
   3. Uang Muka tersebut diatas dapat diberikan hanya apabila PENYEDIA mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
   4. Pengembalian uang muka akan diperhitungkan berangsur-angsur secara proposional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi fisik 100% (seratus persen) dan/atau sesuai pembayaran termin dan ketersediaan anggaran.
   5. Apabila berlakunya Surat Jaminan Uang Muka tersebut di atas hampir berakhir, sedangkan pengembalian Uang Muka belum habis diperhitungkan, maka PENYEDIA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya. Apabila perpanjangan masa berlaku Surat Jaminan Uang Muka belum dapat diserahkan oleh PENYEDIA kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berhak mencairkan Jaminan tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada PENYEDIA dan menyetorkan ke Kas Daerah atau memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PENYEDIA oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah uang muka yang telah dibayarkan oleh PENYEDIA;
b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati dengan sistem termin dimana besarnya pembayaran angsuran pertama dan angsuran berikutnya adalah sebesar prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan disertai laporan kemajuan

hasil pekerjaan dan diterima oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, yang dituangkan di dalam Berita Acara prestasi fisik dengan mengurangkan angsuran pengembalian uang muka, angsuran yang telah dibayarkan, jaminan pemeliharaan (uang retensi) sebesar 5% (lima persen), pengenaan denda (jika ada), dan pajak. Pembayaran akan dibayarkan melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan/atau mengikuti ketersediaan anggaran; dan

c. Pembayaran untuk pekerjaan dengan prestasi 100% (seratus persen) dimana serah terima pertama pekerjaan sudah dilaksanakan, maka nilai pekerjaan akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan sisa pengembalian uang muka/pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya pengenaan denda (jika ada) dan penundaan pembayaran sebesar 5 % (lima persen) dari harga kontrak sebagai retensi serta pajak.

Pasal 11
JAMINAN PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PENYEDIA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK yang berupa Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah/Jamkrida Provinsi Bali.
(2) Nilai jaminan pelaksanaan yaitu **5% (lima persen) x Nilai Penawaran Terkoreksi = 5% x Rp. 49.229.928.000,26 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Koma Dua Enam Rupiah) = Rp. 2.461.496.400,013 (Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Koma Satu Tiga Rupiah).**
(3) Jaminan pelaksanaan berlaku **224 (dua ratus dua puluh empat)** hari kalender terhitung dari diterbitkannya Kontrak.
(4) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan penyerahan jaminan pemeliharaan atau retensi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai KONTRAK.
(5) Apabila terjadi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan Pelaksanaan harus diperpanjang sesuai dengan perpanjangan waktu pelaksanaan/pemberian kesempatan.
(6) Apabila PENYEDIA tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PENYEDIA dianggap tidak mampu dan permintaan perpanjangan waktu tidak dapat disetujui oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

Pasal 12
JAMINAN PEMELIHARAAN

(1) Jaminan Pemeliharaan Wajib diberikan oleh PENYEDIA setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
(2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak harus diberikan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang telah diserahkan.
(3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
(4) Apabila pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 100 % (seratus persen) maka untuk mencairkan retensi diperlukan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah / Jamkrida Provinsi Bali.

(5) Apabila masa pemeliharaan melewati tahun anggaran, PENYEDIA belum menyerahkan jaminan pemeliharaan pada akhir tahun anggaran maka retensi sebesar 5% (lima persen) akan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Bali.

Pasal 13
PENYERAHAN PERTAMA DAN KEDUA

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) PENYEDIA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK untuk penyerahan hasil pekerjaan.
(2) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENYEDIA, bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan PENYEDIA wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
(3) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
(4) PENYEDIA wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
(5) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PENYEDIA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK untuk melakukan Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan.
(6) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah PENYEDIA melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan apabila jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank.
(7) Apabila masa pemeliharaan melampaui tahun anggaran, maka PENYEDIA dapat memperoleh uang retensi dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.
(8) Apabila PENYEDIA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berhak menggunakan uang jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

Pasal 14
ASURANSI

(1) Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) PENYEDIA harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang dipakai, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
(3) Mengenai besarnya asuransi tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

(1) Pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK secara tertulis.
(2) Penentuan harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan tambah, didasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam perincian harga penawaran dan harga satuan OE dan apabila tidak ada, akan ditetapkan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atau persetujuan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK secara tertulis.
(4) Apabila ada pekerjaan tambah, yang mengakibatkan bertambahnya nilai kontrak dan perubahan waktu pelaksanaan, maka PENYEDIA wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan tambahan untuk Jaminan Pelaksanaan minimun sebesar 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan tambah.

Pasal 16
PERALATAN, BAHAN DAN TENAGA KERJA

(1) Semua peralatan dan bahan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini disediakan oleh PENYEDIA.
(2) PENYEDIA berkewajiban mengutamakan penggunaan peralatan/bahan produksi dalam negeri yang telah memenuhi standar yang telah ditentukan, dan menentukan sendiri besarnya kandungan lokal peralatan dan bahan yang digunakan.
(3) PENYEDIA berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    a. PENYEDIA diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerja dalam melaksanakan pekerjaan, dan jika terjadi kecelakaan, PENYEDIA diwajibkan dengan segera memberi pertolongan kepada korban dan segala biaya yang diperlukan menjadi tanggung jawab PENYEDIA;
    b. PENYEDIA berkewajiban menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
    c. PENYEDIA diwajibkan menyediakan barak kerja yang memenuhi persyaratan kesehatan, ketertiban serta persediaan air yang cukup.

Pasal 17
SANKSI-SANKSI

Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi, maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK akan mengenakan sanksi-sanksi kepada PENYEDIA sebagai berikut :

a. memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan;
b. menangguhkan pembayaran;
c. tidak membayar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan Pemberi Tugas;
d. Pembongkaran/penggantian;
e. Mengenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk tiap hari keterlambatan dari Harga Kontrak;

f. Pemutusan Perjanjian Kerja/Kontrak;
g. Memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan;
h. Jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bali apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak pada masa keterlambatan ini; dan
i. Pada masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi, apabila PENYEDIA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta PENYEDIA dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pasal 18
PEMUTUSAN KONTRAK

(1) Apabila PENYEDIA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan telah mendapat 2 (dua) kali peringatan secara lisan dan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berhak secara sepihak memutuskan kontrak. Dalam hal ini Jaminan Pelaksanaan dan sisa jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah dan kepada PENYEDIA akan dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan.
(2) Apabila PENYEDIA secara sepihak memutuskan kontrak tanpa alasan yang dapat diterima PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, maka Jaminan Pelaksanaan dan sisa jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah dan kepada PENYEDIA akan dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan.

Pasal 19
KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA

(1) PENYEDIA bertanggungjawab atas keselamatan kerja pada semua kegiatan di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan pekerjaan :
   a. memberi perhatian penuh atas keselamatan semua orang yang ditugaskan di lapangan serta menjaga keadaan lapangan dan pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga bahaya bagi orang-orang tersebut dapat dihindari;
   b. menyediakan dan memelihara semua penerangan, penjagaan, pemagaran, tanda hati-hati pada waktu dan dimana diperlukan atau diminta oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK atau oleh petugas yang berwewenang untuk melindungi pekerjaan atau untuk keselamatan dan kenyamanan umum;
   c. melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup.
(2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tapi tidak terbatas pada :
   a. PENYEDIAan fasilitas sanitasi untuk pencegahan pencemaran biologi atau pabrik pada lapangan atau lapisan air, saluran, sumur, tangki penampungan atau PENYEDIAan air;
   b. menghindari pengerusakan/pembinasaan tumbuhan dan binatang;
   c. menghindari terjadinya gas/asap buangan dari plant yang merugikan atau berlebihan, serta dari kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan; dan

d. menghindari pengerusakan/gangguan pada lapisan air, saluran, sumur, tangki penampungan/PENYEDIAan air.

(3) Apabila PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berpendapat bahwa tindakan - tindakan pencegahan yang telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan ini tidak memadai, maka PENYEDIA harus melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut sesuai petunjuk yang wajar dari PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

(4) PENYEDIA harus membebaskan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dari tanggung jawab atas kerugian akibat kebisingan dan gangguan-gangguan yang timbul selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan dari tuntutan ganti rugi yang disebabkan atau berhubungan dari tanggung jawab tersebut.

(5) PENYEDIA harus melakukan penanganan terkait Pencegahan Penularan penyakit menular. Biaya Penyelenggaraan Pencegahan Penularan penyakit menular dibebankan kepada PENYEDIA.

(6) Mekanisme tentang Protokol Pencegahan Penularan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

a. Menyediakan fasilitas Pencegahan Penularan penyakit menular yang dilakukan oleh PENYEDIA:
   1. PENYEDIA wajib menyediakan fasilitas tambahan dan melaksanakan tes secara berkala untuk Pencegahan Penularan penyakit menular di kantor dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu;
   2. PENYEDIAan fasilitas tambahan untuk Pencegahan Penularan penyakit menular diantaranya adalah:
      - Masker wajah;
      - Cairan desinfektan;
      - Alat semprot desinfektan manual;
      - Sabun;
      - *Hand Sanitizer;*
      - Tisu;
      - Tempat cuci tangan;
      - Wastafel;
      - Sosialisasi;
      - Pengukur suhu;
      - dll

b. Petugas K3 wajib mengedukasi semua orang untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga diri dari penularan penyakit menular.

Pasal 20
ADDENDUM

(1) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian (KONTRAK) yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :
   a. Perubahan pekerjaan;
   b. Perubahan harga Kontrak;
   c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
   d. Perubahan personil manajerial dan/atau peralatan utama; dan
   e. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah Administrasi.

(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian (KONTRAK) diatur sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Perubahan ketentuan Surat Perjanjian (KONTRAK) dituangkan dalam Addendum Surat Perjanjian (KONTRAK) yang setingkat dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) induknya.

Pasal 21
JAMINAN KONSTRUKSI

(1) PENYEDIA harus menjamin hasil pekerjaannya selama kurun waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung dari selesainya masa pemeliharaan (FHO), bahwa pekerjaan tersebut dari segi teknis masih dianggap baik.
(2) Dalam hal ini terjadinya kerusakan terhadap hasil pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yang diakibatkan kelalaian oleh PENYEDIA yang di tentukan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LPSLKPP RI), maka PENYEDIA wajib memperbaikinya tanpa meminta biaya tambahan.

Pasal 22
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
(2) Yang digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. Bencana alam;
    b. Bencana non alam;
    c. Bencana sosial;
    d. Pemogokan;
    e. Kebakaran;
    f. Kondisi cuaca ekstrim; dan
    g. Gangguan industri lainnya.
(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), maka PENYEDIA wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar.
(4) Untuk keperluan perhitungan atas kerugian yang mungkin terjadi, PENYEDIA perlu segera mengambil tindakan/langkah pengumpulan data mengenai pekerjaan dengan mengambil dokumentasi/foto dan wajib melaporkan kepada Direksi Pekerjaan secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa diikuti laporan terperinci secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
(5) Apabila PENYEDIA lalai melaporkan secara tertulis, sehingga melampaui batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PENYEDIA kehilangan haknya untuk mengajukan *claim* atas kejadian tersebut.

Pasal 23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kontrak ini, maka PARA PIHAK mengutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.
(2) Jika perselisihan PARA PIHAK mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat melalui **Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LPSLKPP RI).**

(3) Selama proses penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 24
D O M I S I L I

PARA PIHAK yang terkait dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) ini sepakat memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 25
KEWAJIBAN TERHADAP PEMERIKSAAN

(1) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal ditemukan kekurangan Kualitas maupun Kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang berakibat merugikan Negara, maka PENYEDIA jasa wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan Kerugian Negara tersebut, apabila tidak bersedia mengembalikan akan dimasukan dalam daftar hitam, dan menanggung sanksi hukum terhadap kelalaian tersebut.
(2) Terhadap seluruh keluhan pengaduan dan laporan Masyarakat/Wartawan/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atas pelaksanaan pekerjaan selama masa kontrak yang kerusakannya karena kelalaian pelaksanaan menjadi tanggung jawab PENYEDIA untuk menyelesaikannya.

Pasal 26
LAPORAN DAN DOKUMENTASI

(1) PENYEDIA wajib membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
(2) PENYEDIA wajib membuat foto-foto pelaksanaan pekerjaan yang merupakan dokumen yang memperlihatkan kegiatan-kegiatan, yaitu situasi dan kondisi sebelum, sedang dan sesudah dikerjakan, sehingga dapat menunjukkan gambaran nyata dari sebagian kegiatan maupun keseluruhan pelaksanaan pekerjaan.
(3) Untuk dapat menunjukkan perbedaan lapangan dari ketiga fase tersebut maka cara memotretnya harus dari lokasi yang sama.
(4) Foto pekerjaan tersebut harus dibuat rangkap 6 (enam) lengkap dengan albumnya dan diserahkan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK sebelum Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 27
KETENTUAN PENUTUP

(1) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (KONTRAK) ini oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, merupakan kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (kontrak) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA
PT. MANIK SEKECAP KARYA



Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Direktur

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, ST., MT
NIP. [redacted]

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (kontrak) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA
PT. MANIK SEKECAP KARYA

Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Direktur

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, ST., MT
NIP. [redacted]

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (kontrak) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA
PT. MANIK SEKECAP KARYA

Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Direktur

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika, ST., MT
NIP. [redacted]

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (kontrak) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA
PT. MANIK SEKECAP KARYA



Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Direktur

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika, ST., MT
NIP. [redacted]

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (kontrak) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA
PT. MANIK SEKECAP KARYA

Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Direktur

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika, ST., MT
NIP. [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 27 April 2026

Yth. Inspektur Daerah Provinsi Bali
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.25.600.1.15.2/4986/CK/DISPUPR.PERKIM

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Undangan Rapat Penandatanganan Kontrak dan Serah Terima Personil	1 (satu) lampiran	Bersama ini dimohon untuk berkenan hadir dalam kegiatan rapat tersebut. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Nusakti Yasa Wedha, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [redacted]

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 27 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/4986/CK/DISPUPR.PERKIM
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : **Undangan Penandatanganan Kontrak**

Yth. (terlampir)
di _
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan:

1. Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Kahyangan Jagat Lainnya dan Huluning Pura)
2. Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
3. Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Eswarya)
4. Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)
5. Pengawasan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem Tahap II

Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Waktu : 11.00 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Cipta, DPUPRKIM Provinsi Bali
Agenda : **Rapat Penandatanganan Kontrak dan Serah Terima Personil**

Demikian disampaikan mohon arahan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah

I Made Mahardika, ST., MT
NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. dst.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA INDONESIA

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B.25.600.1.15.2/4986/CK/DISPUPR.PERKIM
Tanggal : 27 April 2026

Undangan disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
4. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
5. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
6. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Kahyangan Jagat Lainnya dan Huluning Pura);
7. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa);
8. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala);
9. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Eswarya);
10. Tim Teknis pada Pekerjaan Pengawasan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem Tahap II;
11. Direktur PT. TUNAS JAYA SAYUR selaku Penyedia untuk Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Kahyangan Jagat Lainnya dan Huluning Pura);
12. Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA selaku Penyedia untuk Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa) dan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala);
13. Kuasa KSO PT. ANEKA TATA SARANA – PT. EKA MAKMUR BERSAMA – CV. CATUR DHARMA DIATI selaku Penyedia untuk Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Eswarya);
14. Direktur CV. BINA BWANA WISESA selaku Penyedia untuk Pekerjaan Pengawasan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem Tahap II.

Catatan:
Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, peserta rapat wajib membawa tumbler secara mandiri untuk kebutuhan minum.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PT JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI
Jl. Surapati No. 8 Denpasar – Bali 80232, *Phone* : (0361) 224087, 221798, *Fax* : (0361) 265252
website : www.jamkridabali.co.id, *email* : jbm@jamkridabali.co.id

Reg. No : 018/117/JBM/IV/2026

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : **PB.2026.04.0230** **Nilai : Rp. 2.461.496.400,013**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. MANIK SEKECAP KARYA**
   Alamat : Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Bali
   Peserta, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Jl. Surapati No 8 Denpasar - Bali 80232 sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN** bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)**
   Alamat : Jalan Beliton No. 2 Denpasar

   Sebagai Pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang Rp. 2.461.496.400,013

   (terbilang : **dua milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus koma satu tiga rupiah**)

2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan : **Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)**
   yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**
   dari **PENERIMA JAMINAN**
   Nomor : **B.25.600.1.15.2/4753/CK/DISPUPR.PERKIM** Tanggal **22 April 2026**

3. Surat Jaminan ini berlaku selama **224 (dua ratus dua puluh empat)** *Hari kalender dan efektif mulai dari tanggal* **28 April 2026** sampai dengan tanggal **07 Desember 2026**

4. Jaminan ini berlaku apabila :
   a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**

5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji,

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kalender setelah tanggal jatuh tempo jaminan berakhir sebagaimana tercantum pada point 3.

Dikeluarkan di **Denpasar** pada tanggal **27 April 2026**

TERJAMIN

PT. MANIK SEKECAP KARYA

KADEK RISDA INDAH NATASYA, SM.,MM
Direktur

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR UTAMA
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
A. A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) UNTUK PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)

Nomor : B.25.600.1.15.2/4755/CK/DISPUPR.PERKIM

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **I Made Mahardika, ST., MT**
   NIP : 19800806 201101 1 004
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
   Selanjutnya disebut **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

2. Nama : **Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM**
   Perusahaan : PT. MANIK SEKECAP KARYA
   Jabatan : Direktur

   Merupakan pemenang hasil tender Paket **PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)**
   Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan **PENYEDIA** telah melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan hasil sebagai berikut :

1. Dari hasil rapat, telah disepakati bahwa harga yang akan dipergunakan dalam dokumen kontrak Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa) adalah sebesar Rp. 49.229.928.000,26 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Koma Dua Enam Rupiah), dibulatkan menjadi **Rp. 49.229.928.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);**
2. Jangka Waktu Pelaksanaan ditetapkan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);

3. Kontrak dibayarkan dengan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati dengan sistem termin dimana besarnya pembayaran angsuran pertama dan angsuran berikutnya adalah sebesar prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan diterima baik oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, yang dituangkan di dalam Berita Acara prestasi fisik dengan mengurangkan angsuran pengembalian uang muka, angsuran yang telah dibayarkan, jaminan pemeliharaan (uang retensi) sebesar 5% (lima persen), pengenaan denda (jika ada), dan pajak, dan/atau mengikuti ketersediaan anggaran;
4. Setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda 1 $^{0}/_{000}$ (satu per seribu) dari nilai kontrak;
5. Dalam hal terjadi perubahan/addendum SPMK maka Berita Acara ini mengikuti perubahan/addendum SPK dimaksud; dan
6. Melanjutkan proses penandatanganan kontrak antara PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dengan PENYEDIA JASA.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA	**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
PT. MANIK SEKECAP KARYA	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM	**I Made Mahardika, ST., MT**
Direktur	NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali selaku Pengguna Anggaran, (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
3. Arsip.

Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jumat / 24 April 2026
Acara : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Penataan
Tempat : Area Perahyangan Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
1	Putu Tisnayasa	Kepala Bidang Cipta Karya		
2	I Made Mahardika	PPK Hibah		
3	I. [illegible]	Kepala Bidang Bina Konstruksi		
4	Wayan Parsika Utama	Ketua Tim Teknis Pek.		
5	A.A NGK - Dewa Pebri	BPKAD/ Kasubbid FE	[redacted]	
6	Hadek Pisda Indah Natasya	Direktur PT. Manik Sekecap Karya		
7	I Gede Agus Geiri A.P.	Itprov / PPUPD Ahli Pertama		
8	Yesi Martasari	PT. Manik Sekecap Karya		
9	Edy Indrawan	BPPBJ Ek / Ksb Strategi		

Daftar Hadir

Hari/Tanggal :

Acara :

Tempat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
10	I GST Ngr Kusuma ...	B.PBJK / KABAG PLP		
11	Ida MD Asta Anggra	Pt. MSK		
12	I GEDE Rustiawan	— 11 —		
13	I Made Wahyu Wiranata	PJK		
14	Made Ageng Ardi Nugraha, ST	PT. MSK		
15	Ni Pt. Diah Kusumasari	— 11 —		
16	I Putu Giri Kusuma Arjana	— 11 —		
17	Ni Ketut Santika Dewi	Tim Teknis		
18				

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 22 April 2026

Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala BPKAD Provinsi Bali;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.25.600.1.15.2/4869/CK/DISPUPR.PERKIM

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)	1 (satu) Gabung	Bersama ini dimohon untuk berkenan hadir dalam kegiatan rapat tersebut. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Nusakti Yasa Wedha, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [redacted]

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 22 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/4754/CK/DISPUPR.PERKIM
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Persiapan Penandatanganan Kontrak**

Yth. (terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa), Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	24 April 2026
Waktu	:	09.00 Wita – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Cipta, DPUPRKIM Provinsi Bali
Agenda	:	**Rapat Pembahasan Persiapan Penandatanganan Kontrak**

Demikian disampaikan mohon arahan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, ST., MT
NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B.25.600.1.15.2/4754/CK/DISPUPR.PERKIM
Tanggal : 22 April 2026

Undangan disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala BPKAD Provinsi Bali;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
5. Kepala Bidang Cipta Karya, DPUPRKIM Provinsi Bali;
6. Kepala Bidang Bina Konstruksi, DPUPRKIM Provinsi Bali;
7. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya, DPUPRKIM Provinsi Bali;
8. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa);
9. Tim Administrasi pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa);
10. Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA selaku Penyedia Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa), (ikut serta menghadirkan seluruh personil manajerial).

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112). TELEPON (0361) 222883.
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
NOMOR : B.25.600.1.15.2/4753/CK/DISPUPR.PERKIM

TENTANG

SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ)
UNTUK PAKET PEKERJAAN PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor: B.38.000.3.3/18990/P08.P2P/B.PBJEK, tanggal 21 April 2026, Hal: Pemberitahuan Hasil Pemilihan, Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa) pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
b. bahwa pengadaan melalui Tender sebagaimana dimaksud huruf a, sudah selesai dilaksanakan yang dimenangkan oleh PT. MANIK SEKECAP KARYA beralamat di Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa

Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
11. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk Layanan Jasa Konsultan Konstruksi;
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 . Lembar Daerah Nomor 9 Tahun 2025

17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;
18. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Berita Daerah Nomor 64 Tahun 2025
19. Keputusan Direktur Jendral Bina Konstruksi Nomor: 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi;
20. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026;
21. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali No. DPPA/A. 2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April 2026 Tahun Anggaran 2026;
23. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: B.25.100.3/4702/SEKRET/DISPUPR.PERKIM tanggal 14 April 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: B.25.100.3/125/SEKRET/DISPUPR.PERKIM, tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Perusahaan :

Nama : **PT. MANIK SEKECAP KARYA**
NPWP : 0936110808901000
Alamat : Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.
Harga : Rp. 49.229.928.000,26
(Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Koma Dua Enam Rupiah)

sebagai Pemenang Paket Pekerjaan PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA).

KEDUA : Segala yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Besarnya Nilai Jaminan Pelaksanaan yaitu :
5% x Nilai Penawaran Terkoreksi = 5% x Rp. 49.229.928.000,26 = Rp. 2.461.496.400,013 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus koma satu tiga rupiah).

Jangka waktu jaminan pelaksanaan 224 (dua ratus dua puluh empat) hari terhitung dari diterbitkannya SPMK.

KEEMPAT : Pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 22 April 2026

Bali, 22 April 2026
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika, ST., MT
NIP [redacted]

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Povinsi Bali selaku Pengguna Anggaran, (sebagai laporan);
2. PPTK pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, (sebagai laporan);
3. Kepala Seksi Penata Bangunan dan Lingkungan, (sebagai laporan);
4. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

REVIU HASIL PEMILIHAN
PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)
Nomor : B.25.600.1.15.2/4752/CK/DISPUPR.PERKIM

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **I Made Mahardika, ST.,MT**
NIP : [redacted]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

Melaksanakan reviu dokumen Hasil Pemilihan Nomor: B.38.000.3.3/18990/P08.P2P/B.PBJEK Tanggal 21 April 2026 dengan hasil sebagai berikut :

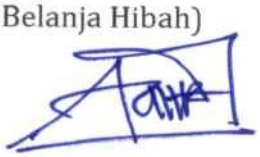
1. Proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada angka 7.2 Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka untuk paket pengadaan dimaksud, apabila sepakat dengan hasil pemilihan pokja dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak.

2. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia (PT. MANIK SEKECAP KARYA) memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu (terlampir), kami menerima Hasil Pemilihan dan akan melanjutkan proses SPPBJ dan Kontrak.

Demikian Reviu Hasil Pemilihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika, ST.,MT
NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. Arsip.

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 21 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/4684/CK/DISPUPR.PERKIM
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Undangan *Reviu* Hasil Pemilihan

Kepada Yth.
Tim Teknis pada Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)

di –
tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa), Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	21 April 2026
Waktu	:	13.00 Wita – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Cipta Karya, DPUPRKIM Provinsi Bali
Agenda	:	Rapat Reviu Hasil Pemilihan

Demikian disampaikan mohon arahan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0008;5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, ST
NIP. [redacted]

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. Arsip.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 21 April 2026

Nomor : B.38.000.3.3/18990/P08.P2P/B.PBJEK
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : **Pemberitahuan Hasil Pemilihan**

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
di
Denpasar

Berdasarkan permohonan Proses Tender pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan kode tender: **10113390000** yang telah diunggah/diupload oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah) bersama ini disampaikan hasil penetapan pemenang pemilihan penyedia untuk pekerjaan **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)** dengan kode RUP 63289248, oleh Pokja Pemilihan 06 sesuai surat nomor: B.38.000.3.3/18754/P010.P2P/B.PBJEK tanggal 20 April 2026 perihal Pemberitahuan Hasil Pemilihan (terlampir), untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Selanjutnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024, pada angka 5.2 Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka untuk paket pengadaan dimaksud sudah dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat yang berwenang (PPK).

Untuk menegakan Integritas, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada perorangan maupun lembaga. Apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai kami saat menerima layanan, agar melaporkan dengan dilengkapi bukti autentik melalui www.lapor.go.id.

Demikian disampaikan untuk perhatian dan tindak lanjut. Terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. Sekretaris Daerah,
Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian

I Made Budi Adiana, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [redacted]

Tembusan:
Inspektur Daerah Provinsi Bali

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 20 April 2026

Nomor : B.38.000.3.3/18754/P010.P2P/B.PBJEK
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : **Pemberitahuan Hasil Pemilihan**

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

di

Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya proses pemilihan penyedia melalui Tender untuk Pekerjaan **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa) (Kode Tender 10113390000)** melalui SPSE 4.5, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil proses Seleksi yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan 06 pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali pada paket **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa) (Kode Tender 10113390000)** (Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor: B.38.000.3.3/17437/P010.P2P/B.PBJEK tanggal 13 April 2026 (terlampir);
2. Selanjutnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024, pada angka 5.2 Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka untuk paket pengadaan dimaksud sudah dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat yang berwenang (PPK).

Demikian disampaikan untuk perhatian dan tindak lanjut. Terimakasih.

Pokja Pemilihan 06
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Ketua,

I Gusti Agung Ayu Wahyuni,ST.,M.Si
NIP. [redacted]

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 20 April 2026

Nomor : B.38.000.3.3/18753/P010.P2P/B.PBJEK
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : **Laporan Hasil Pemilihan**

Yth. Kepala Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

Di

Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya proses pemilihan penyedia melalui Tender untuk Pekerjaan **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)** kode tender: **10113390000** melalui SPSE 4.5, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil Tender :

1. Pagu Anggaran : Rp. 52.372.274.000,00
2. Nilai HPS : Rp. 52.372.267.339,00
3. Pemenang
   - Nama : **PT. MANIK SEKECAP KARYA**
   - Direktur Utama : Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
   - Alamat : Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali
   - NPWP : [redacted]
   - Telepon : 081297500804
   - Email : ptmaniksekecapkarya@gmail.com
   - Nilai Penawaran : Rp. 49.229.928.000,26 (Empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu koma dua enam Rupiah) (94 %)
4. Pemenang Cadangan 1
   - Nama : **PT. TUNAS JAYA SANUR**
   - Direktur Utama : I Made Budi Atmika, ST
   - Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai, No. 21, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.

- NPWP : [redacted]
- Telepon : 081338796526
- Email : pttjs@pttjs.com
- Nilai Penawaran : Rp. 51.877.777.000,00 (Lima Puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).(99,06%)

b. Data Proses Pemilihan:

1. Peserta yang mendaftar : 34 (tiga puluh empat) peserta
2. Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran : 2 (dua) peserta
3. Peserta yang memenuhi persyaratan : 2 (dua) peserta

c. Jenis Pekerjaan : Jasa Konstruksi

Bersama ini pula terlampir kami sampaikan seluruh rekaman dokumen proses Pemilihan pekerjaan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan dalam proses lebih lanjut. Terimakasih.

Pokja Pemilihan 06
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Ketua,

I Gusti Agung Ayu Wahyuni,ST.,M.Si
NIP. [redacted]

Tembusan:
1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
2. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Berita Acara Hasil Pemilihan

PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)

Nomor : B.38.000.3.3/17437/P010.P2P/B.PBJEK

Pada hari ini, 13 April 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10113390000
Nama Tender	:	Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
Nilai Total HPS	:	Rp. 52.372.267.339,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 34 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. MANIK SEKECAP KARYA	Rp. 49.229.928.000,26
2	PT. TUNAS JAYA SANUR	Rp. 51.877.777.000,00
3	PT. MELANGIT JAYA MANDIRI	
4	PT. DIODA INTI NUSANTARA	
5	CV TIRTA LUHUR	
6	cv. mulia karya utama	
7	CV.MURJAYADI UTAMA	
8	PT. ELANG BHUMI PERSADA	
9	PT. Setvi Tunas Utama	
10	CV. KRISYA JAYA UTAMA	
11	CV. NADI GUNA KARYA	
12	CV. KARYA SURYA PRATAMA	
13	PT. CANDI BENTAR KARYA	
14	PT SURYA BALI KONSTRUKSI	
15	ADI GANDHA LARAS JAYA	
16	CV. KARMA YUDHA	
17	CV. MIRUEK TAMAN	
18	WANGUN AMERTHA JAYA	
19	CV.Ratu Gede	

GINA KARYA UTAMA

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

21	PT. SINARBALI BINAKARYA	
22	PT. KRESNA PUTRA KARYA	
23	PT. DEWATA BALI ELEKTRIK	
24	CV. Dian Artha Utama	
25	Adhi Jaya	
26	CV. MANDAWE	
27	CV. Amartya Jaya	
28	CV. Pegasus	
29	SAID BUDAIRY	
30	PT. SAKA BANGUN CIPTA	
31	cv. battar	
32	PT. MEGA MESARI GROUP	
33	CV. ARCHIVIL ENGINEERING	
34	PT. TUNAS JAYA NUSANTARA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	Rp. 51.877.777.000,00	Rp. 51.877.777.000,00	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	Rp. 49.229.928.000,26	Rp. 49.229.928.000,26	LULUS	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Bali

ttd,

Pokja 10

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI HARGA TIMPANG

Nomor: B.38.000.3.3/16794/P010.P2P/B.PBJEK

Kode Tender	:	10113390000
Nama Paket	:	Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Karangasem
Nilai Total HPS	:	Rp. 52.372.267.339,00 termasuk PPN 11%
Sumber Dana	:	APBD Provinsi Bali
Tahun Anggaran	:	2026
Pagu Anggaran	:	Rp. 52.372.274.000,00
Unit Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 (dua ratus sepuluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Metode Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan 010 pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.38.000.3/62772/P2P/B.PBJEK Tanggal 16 Desember 2025, telah melakukan klarifikasi harga timpang terhadap penawaran **PT. MANIK SEKECAP KARYA** untuk pekerjaan tersebut di atas, sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
3. Dokumen Pemilihan Nomor: B.38.000.3.3/11231/P10.P2PA/B.PBJEK Tanggal 9 Maret 2026.
4. Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: B.38.000.3.2/11774/P010.P2P/B.PBJEK Tanggal 11 Maret 2026
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Konstruksi.

6. Dokumen Penawaran PT. Manik Sekecap Karya.

B. MEKANISME DAN PROSEDUR KLARIFIKASI HARGA

1. Pokja Pemilihan 010 melakukan klarifikasi harga timpang secara daring berupa jawaban dokumen klarifikasi harga timpang yang dibuat peserta tender secara tertulis (dapat ditulis tangan dan atau diketik) dan disampaikan via email menggunakan email peserta yang terdaftar pada sistem SPSE. Email lain yang bukan terdaftar pada sistem SPSE tidak akan diproses/dilayani dan tidak dianggap sebagai proses klarifikasi.
2. Dokumen dan/atau data dan atau informasi dalam jawaban klarifikasi yang diberikan melalui email perusahaan yang terdaftar pada sistem SPSE dianggap telah mendapat persetujuan dari pimpinan dan pengurus perusahaan. Untuk itu diharapkan peserta tender meneliti materi jawaban sebelum dikirimkan kepada Pokja.
3. Jawaban dikirimkan ke email resmi Pokja Pemilihan 010 yaitu pokja6tahun2026@gmail.com sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Pokja.Untuk tertib administrasi, Pokja hanya menerima jawaban melalui email resmi pokja tidak melalui metode lainnya.
4. Apabila peserta mengirimkan jawaban klarifikasi lewat batas waktu yang diberikan maka tidak akan diproses/dilayani dan dianggap tidak dapat memberikan klarifikasi.
5. Apabila peserta mengirim jawaban melalui metode lainnya tidak akan diproses/dilayani dan dianggap tidak dapat memberikan klarifikasi.
6. Nomor jawaban disesuaikan dengan nomor pertanyaan pada poin C dokumen ini. Jawaban harus terbaca jelas, tidak buram dan mudah dipahami.
7. Format jawaban dapat berupa format pdf atau word atau format lainnya yang mudah dibaca pada sistem operasi windows.
8. Dengan mengirimkan jawaban klarifikasi, Pokja menganggap peserta tender telah membaca dengan teliti dan seksama seluruh mekanisme dan ketentuan dalam dokumen ini.
9. Kerusakan dan atau kehilangan file dan atau data jawaban klarifikasi saat proses pengiriman melalui email tidak menjadi tanggung jawab Pokja. Penting dilakukan back up data terlebih dahulu.
10. Pokja tidak melayani hal-hal yang di luar mekanisme dan ketentuan dalam dokumen ini.
11. Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
12. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:
    a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses tender; dan/atau
    b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

C. PERTANYAAN KLARIFIKASI HARGA TIMPANG

1. Saat ini Saudara diklarifikasi sehubungan dengan penawaran Saudara terhadap paket pekerjaan tersebut di atas. Sebagai direktur/perwakilan dari PT.Manik Sekecap Karya yang akan diklarifikasi, apakah Saudara sanggup untuk diklarifikasi terkait hal tersebut ?

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

2. Harga satuan pekerjaan di atas 110% HPS (terlampir). Setujukah Saudara harga satuan pekerjaan tersebut di atas dinyatakan sebagai harga satuan timpang ?
3. Apabila tidak setuju, mohon bukti-bukti pendukung bahwa harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar. Apabila Saudara tidak memberikan jawaban dan/atau jawaban disampaikan melebihi batas waktu yang diberikan maka harga satuan dalam poin C.2. tersebut di atas dinyatakan sebagai harga satuan timpang.

D. BATAS WAKTU PENGIRIMAN JAWABAN

1. Jawaban klarifikasi harga timpang dibuat bertanggal dan ditandatangani direktur atau yang mewakili sesuai ketentuan, memakai kertas berkop perusahaan.
2. Batas waktu penyampaian jawaban klarifikasi harga timpang yaitu pada:
   Hari : Kamis
   Tanggal : 9 April 2026
   Pukul : 15.00 WITA
3. Ditujukan: Pokja Pemilihan 010 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Email: pokja6tahun2026@gmail.com
4. Email PT.Manik Sekecap Karya yang harus digunakan dan yang terdaftar pada SPSE adalah: ptmaniksekecapkarya@gmail.com

Demikian klarifikasi harga timpang secara daring disampaikan, selanjutnya hasil Klarifikasi ini menjadi dasar untuk menyusun Berita Acara Evaluasi Penawaran.

Pokja Pemilihan 010
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Setda Provinsi Bali

1. I Gusti Agung Ayu Wahyuni, S.T., M.Si .....
2. I Md. Natalisto Desi Junior, S.E. .....
3. A.A. Gede Ari Sudana, S.Kom .....
4. Ni Kadek Dwi Rahayu, S.Ak .....
5. Ni Putu Sudyastini, S.E. .....

Direktur/Penerima Kuasa
PT. MANIK SEKECAP KARYA

(Kadek Risda Indah Natasya .)

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Kode Tender 10113390000
Nama Paket Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
Nama Peserta PT. MANIK SEKECAP KARYA

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	PPK				Peserta				
a. Jaring Pengaman (Safety Net)	m2	200	6.333,33	1.266.666,00	11	1.405.999,26	7.000,00	1.400.000,00	11	1.554.000,00	Timpang
a. Rambu Petunjuk	bh	8	25.000,00	200.000,00	11	222.000,00	50.000,00	400.000,00	11	444.000,00	Timpang
b. Rambu Informasi	bh	8	25.000,00	200.000,00	11	222.000,00	50.000,00	400.000,00	11	444.000,00	Timpang
Pipa Air Kotor & Bekas (PVC) AW 4	m	204,8	113.284,60	23.199.553,23	11	25.751.504,09	176.064,90	36.056.330,87	11	40.022.527,27	Timpang
Pipa Air Kotor & Bekas (PVC) AW 3	m	38,42	84.907,90	3.262.161,52	11	3.620.999,28	111.630,20	4.288.832,28	11	4.760.603,84	Timpang
Pipa Air Kotor & Bekas (PVC) AW 2	m	11,6	50.274,40	583.183,04	11	647.333,17	67.456,40	782.494,24	11	868.568,61	Timpang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Berita Acara Evaluasi Penawaran

PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA)

Nomor : B.38.000.3.3/17389/P010.P2P/B.PBJEK

Pada hari ini, 13 April 2026, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10113390000
Nama Tender	:	Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
Nilai Total HPS	:	Rp. 52.372.267.339,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 34 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. MANIK SEKECAP KARYA	Rp. 49.229.928.000,26
2	PT. TUNAS JAYA SANUR	Rp. 51.877.777.000,00
3	PT. MELANGIT JAYA MANDIRI	
4	PT. DIODA INTI NUSANTARA	
5	CV TIRTA LUHUR	
6	cv. mulia karya utama	
7	CV.MURJAYADI UTAMA	
8	PT. ELANG BHUMI PERSADA	
9	PT. Setvi Tunas Utama	
10	CV. KRISYA JAYA UTAMA	
11	CV. NADI GUNA KARYA	
12	CV. KARYA SURYA PRATAMA	
13	PT. CANDI BENTAR KARYA	
14	PT SURYA BALI KONSTRUKSI	
15	ADI GANDHA LARAS JAYA	
16	CV. KARMA YUDHA	
17	CV. MIRUEK TAMAN	
18	WANGUN AMERTHA JAYA	
19	CV.Ratu Gede	
	GINA KARYA UTAMA	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

21	PT. SINARBALI BINAKARYA	
22	PT. KRESNA PUTRA KARYA	
23	PT. DEWATA BALI ELEKTRIK	
24	CV. Dian Artha Utama	
25	Adhi Jaya	
26	CV. MANDAWE	
27	CV. Amartya Jaya	
28	CV. Pegasus	
29	SAID BUDAIRY	
30	PT. SAKA BANGUN CIPTA	
31	cv. battar	
32	PT. MEGA MESARI GROUP	
33	CV. ARCHIVIL ENGINEERING	
34	PT. TUNAS JAYA NUSANTARA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	Rp. 51.877.777.000,00	Rp. 51.877.777.000,00	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	Rp. 49.229.928.000,26	Rp. 49.229.928.000,26	LULUS	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Bali

ttd,

Pokja 10

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

BERITA ACARA
ADENDUM DOKUMEN PEMILIHAN
Nomor : B.38.000.3.3/11772/P010.P2P/B.PBJEK

Kode Tender	:	10113390000
Nama Paket	:	Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
Lokasi Kegiatan	:	Ruas Jalan Provinsi - Gianyar (Kab.)
Nilai HPS	:	Rp52.372.267.339,00 termasuk PPN 11%
Sumber Dana	:	APBD Provinsi Bali
Tahun Anggaran	:	2026
Pagu Anggaran	:	Rp52.372.274.000,00
Unit Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Masa Pelaksanaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Metode Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan 010 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.38.000.3/62772/P2P/B.PBJEK Tanggal 16 Desember 2025, telah melakukan Adendum terhadap Dokumen Pemilihan Nomor: B.38.000.3.3/11231/P10.P2PA/B.PBJEK, tanggal 9 Maret 2026 untuk Tender paket pengadaan tersebut di atas.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya;
2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan Tender Nomor : B.38.000.3.3/11750/P10.P2P/B.PBJEK, tanggal 11 Maret 2026.

B. RINCIAN PERUBAHAN/ADENDUM

Adapun rincian perubahan/Adendum Dokumen Pemilihan sebagai berikut:

1. BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Huruf F. Persyaratan Teknis

SEMULA

3	Manajer Teknik (1 or)	5 tahun	SKA/SKK Ahli Madya Konstruksi Bangunan Gedung (Jenjang 8)

MENJADI

3	Manajer Teknik (1 or)	5 tahun	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 8)

Adendum/perubahan **Dokumen Pemilihan** di *upload*/ di unggah melalui menu Dokumen Pemilihan pada SPSE dengan nama file **"Adendum Dokumen Pemilihan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa).pdf"**.

Berita Acara Adendum Dokumen Pemilihan ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
1.03.09.1.01.0019; 5.1.05 Belanja Hibah),

I Made Mahardika,ST
NIP. 19800806 201101 1 004

Pokja Pemilihan 010
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NAMA	TANDA TANGAN
I Gusti Agung Ayu Wahyuni, S.T., M.Si	.....
I Md. Natalisto Desi Junior, S.E.	.....
A.A. Gede Ari Sudana, S.Kom	.....
Ni Kadek Dwi Rahayu, S.Ak	.....
Ni Putu Sudyastini. S.E	.....

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 11 Maret 2026

Nomor : B.38.000.3.3/11638/P010.P2PA/B.PBJEK
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Undangan Pemberian Penjelasan

Yth. 1. Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bali

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

BERITA ACARA
REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
Nomor: B.38.000.3.3/9201/P10.P2PA/B.PBJEK

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, kami Pokja Pemilihan 10 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019; 5.1.05 Belanja Hibah), telah mengadakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Data Pekerjaan :
   a. Paket Pekerjaan : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa).
   b. Sumber Dana : APBD Provinsi Bali TA 2026
   c. Pagu anggaran : Rp 52.372.274.000,00

2. Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ini adalah:
   a. Spesifikasi Teknis/KAK : Tetap/sesuai/diusulkan perubahan
   b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Tetap/sesuai/diusulkan perubahan
   c. Rancangan Kontrak : Tetap/sesuai/diusulkan perubahan
   d. DPA : Tetap/sesuai/diusulkan perubahan
   e. RUP : Tetap/sesuai/diusulkan perubahan
   f. Waktu Pelaksanaan : Tetap/sesuai/diusulkan perubahan
   g. Analisa Pasar : Tetap/sesuai/diusulkan perubahan

Demikian Berita Acara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	I Made Mahardika,ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 1.03.09.1.01.0019; 5.1.05 Belanja Hibah)	
2	I Gusti Agung Ayu Wahyuni, S.T., M.Si	Ketua Pokja Pemilihan 10	
3	I Md. Natalisto Desi Junior, S.E.	Anggota Pokja Pemilihan 10	
4	A.A. Gede Ari Sudana, S.Kom	Anggota Pokja Pemilihan 10	
5	Ni Kadek Dwi Rahayu, S.Ak	Anggota Pokja Pemilihan 10	
6	Ni Putu Sudyastini. S.E	Anggota Pokja Pemilihan 10	

Lampiran BA Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
Nomor : B.38.000.3.3/9201/P10.P2PA/B.PBJEK
Tanggal : 23 Pebruari 2016

RINCIAN HASIL REVIU

NO	URAIAN KEGIATAN / REVIU DOKUMEN	REVIU POKJA PEMILIHAN	TANGGAPAN PPK
	Reviu dokumen persiapan pengadaan:		
a.	Surat Keputusan tentang Penunjukan selaku PPK	• Apakah Saudara selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pekerjaan tersebut?, Mohon dituliskan SK tentang penunjukan selaku PPK.	Ya saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor B.25.100.3/125/SEKRET/DISPUPR.PERKIM tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
b.	Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)	• Apakah spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik.	Sudah dituangkan secara lengkap
		• Apakah Spesifikasi teknis/KAK Sudah didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beserta Perubahannya	Sudah didefinisikan dengan jelas
		• Apakah pada paket ini telah dipertimbangkan mengutamakan dan/atau menggunakan produk dalam negeri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya.	Sudah menggunakan produk dalam negeri
c.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	• Apakah nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. • Apakah tenaga ahli yang dicantumkan cukup untuk melaksanakan pekerjaan	Nilai HPS dan tenaga ahli telah sesuai

NO	URAIAN KEGIATAN / REVIU DOKUMEN	REVIU POKJA PEMILIHAN	TANGGAPAN PPK
		sesuai dengan ruang lingkup dalam KAK	
		• Apakah HPS disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan.	HPS disusun pada tahap perencanaan dengan informasi terkini serta komponen/unsur telah sesuai dengan spesifikasi teknis
		• Apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/ SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan	Sudah
d.	Rancangan Kontrak	Apakah Rancangan Kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.	Sudah sesuai
	i. Naskah Perjanjian;		
	ii. Syarat-syarat Umum Kontrak;		
	ii. Syarat-syarat Khusus Kontrak;		
	v. Ketentuan Uang Muka;		
	v. Ketentuan Jaminan Pengadaan;		
	vi. Ketentuan Sertifikat Garansi;		
	ii. Ketentuan Sertifikat/ Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau		
	ii. Ketentuan Penyesuaian Harga		
e.	Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan)	Apakah anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup pada Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-	Anggaran telah tersedia dan cukup

NO	URAIAN KEGIATAN / REVIU DOKUMEN	REVIU POKJA PEMILIHAN	TANGGAPAN PPK
		KL/RKAPD yang telah ditetapkan)	
f.	ID paket RUP	Apakah paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP dengan ID paket RUP	Paket telah terdaftar dalam SIRUP
g.	Waktu penggunaan barang/jasa	Apakah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa dengan waktu penggunaan barang/jasa	Dapat terselesaikan
h.	Analisis Pasar	• Apakah ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan.	Tersedia
		• Apakah Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.	Hasil analisa pasar digunakan
		• Apakah hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional	Pelaku usaha dalam negeri mampu memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan

Catatan:

I. Spesifikasi Teknis :

1. [1. LATAR BELAKANG] Mohon untuk dicek redaksi *"Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Bali melalui DPPA APBD Tahun 2025 menganggarkan Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem Tahap I."* apakah yang dimaksud adalah *"DPA APBD Tahun 2026"*?
2. [5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA] Mohon dicek kembali pada redaksi *"Kegiatan pekerjaan ini akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025"* apakah yang dimaksud adalah *"2026"*?

menganggarkan Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem Tahap I." apakah yang dimaksud adalah *"DPA APBD Tahun 2026"*?

2. [5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA] Mohon dicek kembali pada redaksi *"Kegiatan pekerjaan ini akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025"* apakah yang dimaksud adalah *"2026"*?
3. [5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA] Sumber Dana dan Perkiraan Biaya Hal.3 tertulis Tahun Anggaran 2025
4. [6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG] Lingkup pekerjaan sebaiknya tambahkan lagi 1 Pura Pemelastian, supaya lebih jelas rincian pekerjaan bukan bagian dari Pura Ida Ratu Dukuh, karena dari lokasi dan fungsi berbeda.
5. [6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG] Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (agar ditambahkan nomor urut A.1)
6. [7. PERSYARATAN PENYEDIA DAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI] Agar diperhatikan kembali untuk kesesuaian Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan jenjang jabatan yang dibutuhkan
7. [7. PERSYARATAN PENYEDIA DAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI] Personil manajerial untuk paket kualifikasi besar pengalaman yang dipersyaratkan paling lama 5 tahun (Berdasarkan Perlem LKPP 12/2021 Lamp 2 hal 52)
8. [9. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN] Metode Pelaksanaan Pekerjaan mohon diisi gambaran umum saja yang nantinya akan dikembangkan oleh peserta tender;
9. [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 1. PERATURAN-PERATURAN TEKNIS] Peraturan teknis mohon dicantumkan peraturan terbaru antara lain Pergub Bali tentang UMK
10. [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 1. PERATURAN-PERATURAN TEKNIS] Agar disesuaikan menjadi :
    a. Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
    b. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026
11. [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 4. RUANG LINGKUP] Lingkup pekerjaan di Pendahuluan Spesifikasi Teknis dan di dalam Spesifikasi teknis agar konsisten di pendahuluan ada 5 Pura di dalam Sepsifikasi (Hal.12) ada 4 Pura, sekaligus dipertimbangkan memasukkan pura pemelastian sebagai entitas baru.[PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 4. RUANG LINGKUP]

1) Zona 3 (Pura Catur Lawa)

a. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

b. Pura Ida Ratu Pasek

- Pekerjaan Penataan Halaman
- Pekerjaan Wantilan
- Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
- Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing

c. Pura Ida Ratu Penyarikan

- Pekerjaan Penataan Halaman
- Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
- Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing

d. Pura Ida Ratu Pande

- Pekerjaan Penataan Halaman
- Pekerjaan Toilet, Gudang dan Bale Pesandekan
- Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
- Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing

e. Pura Ida Ratu Dukuh Pesimpenan

- Pekerjaan Penataan Halaman
- Pekerjaan Dapur dan Toilet
- Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
- Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing

Lingkup pekerjaan tidak sesuai/tidak sama dengan pada poin [6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG]

12. [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 4.1 DOKUMEN KONTRAK] Agar disesuaikan dengan Rancangan Kontrak [Surat Perjanjian Kerja; Pasal 4; DOKUMEN KONTRAK; Ayat (1),(2)]
13. [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 4.2 SARANA DAN CARA KERJA] Mohon redaksi *"3. Penyedia Jasa harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen, pompa air, timbris, waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik."* agar disesuaikan menjadi *"3. Penyedia Jasa harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan yang diperlukan untuk pekerjaan ini dalam kondisi baik."*
14. [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 9. PERSONIL MANAJERIAL] Personil dan peralatan pada spesifikasi bisa dibuat sesuai KAK atau dibuat rinci sesuai rencana kegiatan tapi lakukan konsisten di setiap spesifikasi.
15. [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 9. PERSONIL MANAJERIAL] Agar disesuaikan dengan [7. PERSYARATAN PENYEDIA DAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI]

16. [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 10. DAFTAR PERALATAN] Pekerjaan pondasi bore pile agar dilengkapi keterangan mengenai lokasi pelaksanaan, yaitu dilaksanakan pada pura yang mana saja. Hal ini perlu dikaitkan dengan klasifikasi peralatan yang digunakan, apakah termasuk peralatan utama atau peralatan pendukung, guna menjamin kejelasan dalam Spesifikasi Teknis dan Daftar Peralatan.
17. [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 10. DAFTAR PERALATAN] Agar disesuaikan dengan [8. JUMLAH PERALATAN YANG DIPERLUKAN].
18. [PASAL 1 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK); 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)] Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan SMKK yang wajib dipunyai dan dipenuhi dalam pelaksanaan paket pekerjaan ini Adalah UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi status masih berlaku namun telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
19. [PASAL 1 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK); 3. PEKERJAAN DENGAN IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN TERBESAR] Agar ditambahkan ke daftar identifikasi :
    - Pekerjaan Penutup Atap ; Terjatuh dari ketinggian sesuai daftar identifikasi [2. REKAPITULASI IDENTIFIKASI BAHAYA PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN]
20. Mohon diperhatikan kembali format pengetikan karena banyak halaman yang berjarak.
21. Mohon untuk personil manajerial dan peralatan utama pada pendahuluan dan isi spesifikasi Teknis tidak tumpang tindih dan dibuat sekali di awal sehingga tidak membingungkan karena isinya berbeda.
22. Mohon untuk spesifikasi bisa dibuat per pekerjaan dengan mengisi keterangan dilaksanakan di Pura yang mana dikarenakan banyak pekerjaan yang sama di tiap pura.
23. Mohon agar diselaraskan antara Spesifikasi teknis, HPS dan Gambar.
24. Mohon penjelasan terkait Halaman 122 tercantum redaksi *Pura Kiduling Kreteg*.
25. Terkait kearifan lokal rehab pura pada umumnya, mohon untuk prosesi atau upakara yang dilakukan apakah sebaiknya disebutkan sekilas dalam spesifikasi teknis di metode pelaksanaan pekerjaan?
26. Terkait Jaminan dan dukungan bahan atau tenaga bisa dicantumkan dalam SSKK atau di lampiran SSKK sebagai persyaratan berkontrak.

II. Rancangan Kontrak :

1. Peraturan yang digunakan mohon diperhatikan kembali, dicantumkan yang terbaru,missal no.9 Peraturan Daerah terkait APBD 2026.
2. Ruang lingkup pekerjaan mohon konsisten
3. Kode Rekening Pekerjaan mohon sesuaikan dengan DPA (berbeda angka angkanya).
4. Dapat menambahkan ketentuan asuransi yang mengacu pada SSKK dan SSUK poin 55. tentang asuransi.
5. [Jabatan PPK] Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. **(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0008;5.1.05 Belanja Hibah)** ***Direvisi menjadi :*** **(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)**
6. [Dan dengan memperhatikan:] **Agar disesuaikan dengan Spesifikasi Teknis pada [PASAL 1 JENIS PEKERJAAN; 1. PERATURAN-PERATURAN TEKNIS]**
7. **[Penulisan Nama Kegiatan; Sub Kegiatan]** Agar Konsisten dalam Penulisan Nama Kegiatan dan Sub. Kegiatan sesuai DPA yaitu sebagai berikut : Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
8. [Pasal 3; HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN] Mohon untuk penulisan "DPPA" diubah menjadi "DPA".
9. **[Pasal 3; HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN]** Mohon redaksi *"Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp.....,00 (..... Rupiah), dengan kode rekening 1.03.09.1.01.0008.5.1.05.05.01.0002 untuk Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA), Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan atau menyesuaikan ketersediaan anggaran."*

   Direvisi menjadi : *"Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp.....,00*

(..... Rupiah), dengan kode rekening 1.03.09.1.01.0019. 5.1.05.05.001.00002 untuk Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA), Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan DPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan atau menyesuaikan ketersediaan anggaran".

10 **[Pasal 3; HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN]** Mohon redaksi *"Kontrak ini dibiayai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 DPPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: No. DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal* ***3 Januari 2026*** *Tahun Anggaran 2026,* ***Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota****, sudah termasuk semua jenis pajak serta segala jenis pengeluaran PENYEDIA. "*
Direvisi menjadi : ***"****Kontrak ini dibiayai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026* ***DPA*** *Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: No. DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal* ***2 Januari 2026*** *Tahun Anggaran 2026,* ***Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota****, sudah termasuk semua jenis pajak serta segala jenis pengeluaran PENYEDIA."*

11 [Pasal 6; TUJUAN KONTRAK] Mohon redaksi *"Tujuan Perjanjian Kerja ini, untuk melaksanakan pekerjaan hasil tender PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA), Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sumber dana APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 yang tertuang di dalam DPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026."*

Direvisi menjadi : *"Tujuan Perjanjian Kerja ini, untuk melaksanakan pekerjaan PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LAWA), Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sumber dana APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 yang tertuang di dalam DPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026."*

12. [Pasal 10; CARA PEMBAYARAN] Mohon redaksi *"Pembayaran Harga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :"* **Direvisi menjadi :** *"Pembayaran Harga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut :"*
13. [Pasal 11; JAMINAN PELAKSANAAN] (1) Untuk melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja ini PENYEDIA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK yang berupa Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah / Jamkrida Provinsi Bali. Cek Kembali ketentuan pasal 1; jika tidak sesuai saran untuk ditulis nama pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
14. [Pasal 27; KETENTUAN PENUTUP] Mohon redaksi *"(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2."*

    Direvisi menjadi : *"(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4."*
15. Mohon untuk menambahkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan pada Rancangan Kontrak *Sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 62380 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta Sektor Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Huruf C Point 1, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali agar memastikan penyedia yang melaksanakan pekerjaan konstruksi di Perangkat Daerah yang dikelolanya untuk mendaftarkan*

seluruh pekerja jasa konstruksi pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan melakukan kewajiban pembayaran iuran tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan (SE terlampir).

III. SSUK:

1. Mohon menggunakan SSUK sesuai Dokumen MDP Perlem LKPP 12/2021
2. Mohon agar mengunggah dokumen SSUK yang sudah disahkan/ditandatangani PPK.
3. Mohon agar PPK memastikan penyedia melaksanakan ketentuan yang tertulis sesuai dengan SSUK Poin 46 tentang Asuransi.

IV. SSKK:

1. SSKK mengacu pada SSUK dalam mengutip butir butir pasalnya.
2. Pasal 33.19 dalam SSKK harusnya merujuk pada pasal 33.14. pada SSUK
3. Pasal 33.22 dalam SSKK harus mengacu pada pasal 33.17 pada SSUK
4. Disarankan agar menambahkan klausul 55 SSUK tentang Asuransi.dan Perlindungan Tenaga Kerja pasal 53 dalam SSUK
5. Lampiran Mata Pembayaran Utama belum disampaikan, mohon untuk melengkapi
6. Lampiran A daftar personil mohon disesuaikan nama jabatan ahli sesuai SK Dirjen Binakon no 114/2024, dan untuk kualifikasi besar pengalaman paling lama 5 tahun
7. Daftar surat dukungan diisi keterangan dilaksanakan saat proses berkontrak.
8. [Pasal 6.3.b; 6.3.c] Mohon diseragamkan untuk penomoran antara SSUK dan SSKK [SSUK Pasal 6.3.2); 6.3.3) sedangkan SSKK Pasal 6.3.b; 6.3.c]
9. [Pasal 33.19] SSKK disebut [pasal 33.19] sedangkan SSUK tidak ada pasal dimaksud (catatan : SSUK tidak digunakan)
10. [Pasal 33.22] SSKK disebut [pasal 33.22] sedangkan SSUK tidak ada pasal dimaksud (catatan : SSUK tidak digunakan)
11. [Pasal 45.b] Mohon diseragamkan untuk penomoran antara SSUK dan SSKK [SSUK Pasal 45.1sedangkan SSKK Pasal 45.b]
12. [Pasal 70.1.(e)] Mohon diperhatikan apakah yang dimaksud Adalah point (b) atau (e)
13. [Pasal 79] Huruf (c) disarankan untuk dihapus

V. Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

1. Mohon dipertimbangkan untuk mengunggah BOQ dalam bentuk PDF tanpa harga, untuk mengecek analisa yang digunakan mengingat pekerjaan style Bali memerlukan analisa khusus.
2. Mohon dipastikan dalam penyusunan HPS telah menggunakan AHSP sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor

30/SE/Dk/2025 tentang Tata Cara penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Mohon dipastikan agar baris overhead & profit dipisahkan dan besaran persentase masing-masing disesuaikan kembali sesuai dengan SE LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.
4. Mohon dipastikan harga bahan sudah menggunakan harga pasar terkini.
5. Mohon dipastikan item pekerjaan dalam HPS sudah diuraikan dalam Spesifikasi Teknis.
6. Untuk daftar item pekerjaan yang tercantum pada MPU, mohon dipastikan 1. apakah penentuannya sudah dengan memperhitungkan item pekerjaan dengan nilai 80% dari HPS
7. Ada beberapa item masih tidak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

VI. Informasi Lainnya : -

1. Jika terdapat perubahan dokumen persiapan pengadaan yang diunggah ke SPSE, agar menginformasikan ke Pokja Pemilihan. Mohon tanggapan PPK pada lampiran berita acara berikut.

VII. Penetapan Resiko

1. [Nilai Total HPS (Rp)] Mohon konfirmasi apakah sudah sesuai atau salah pengetikan nilai?

Tanggapan:

I. Spesifikasi Teknis :

1. Sudah disesuaikan
2. Sudah disesuaikan
3. Sudah disesuaikan
4. Pura Pemelastian tetap menjadi bagian dari Pura Ida Ratu Dukuh sesuai dengan dokumen terupload di sistem
5. Sudah disesuaikan
6. Sudah disesuaikan
7. Sudah disesuaikan
8. Sudah disesuaikan
9. Sudah disesuaikan
10. Sudah disesuaikan
11. Sudah disesuaikan
12. Sudah disesuaikan
13. Sudah disesuaikan
14. Sudah disesuaikan
15. Sudah disesuaikan

16. Sudah disesuaikan
17. Sudah disesuaikan
18. Sudah disesuaikan
19. Sudah disesuaikan
20. Sudah disesuaikan
21. Sudah disesuaikan
22. Sudah disesuaikan
23. Sudah disesuaikan
24. Sudah disesuaikan
25. Sudah disesuaikan
26. Surat dukungan disyaratkan sebagai persyaratan teknis yang ditambahkan pada proses tender ini (kajian teknis yang telah ditandatangan oleh PA terlampir)

II. Rancangan Kontrak :

1. Sudah disesuaikan
2. Sudah disesuaikan
3. Sudah disesuaikan
4. Sudah disesuaikan
5. Sudah disesuaikan
6. Sudah disesuaikan
7. Sudah disesuaikan
8. Sudah disesuaikan
9. Sudah disesuaikan
10. Sudah disesuaikan
11. Sudah disesuaikan
12. Sudah disesuaikan
13. Sudah disesuaikan
14. Sudah disesuaikan
15. Sudah disesuaikan

III. SSUK:

1. Sudah disesuaikan
2. Sudah disesuaikan
3. Sudah disesuaikan

IV. SSKK:

1. Sudah disesuaikan
2. Sudah disesuaikan
3. Sudah disesuaikan
4. Sudah disesuaikan
5. Sudah disesuaikan

6. Sudah disesuaikan
7. Sudah disesuaikan
8. Sudah disesuaikan
9. Sudah disesuaikan
10. Sudah disesuaikan
11. Sudah disesuaikan
12. Sudah disesuaikan
13. Sudah disesuaikan

V. Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

1. BOQ akan diupload dalam sistem
2. Sudah disesuaikan
3. Sudah disesuaikan
4. Sudah disesuaikan
5. Sudah disesuaikan
6. Sudah disesuaikan
7. Sudah disesuaikan

VI. Informasi Lainnya :

1. Sudah disesuaikan

VII. Penetapan Resiko

1. Sudah disesuaikan

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	I Made Mahardika,ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 1.03.09.1.01.0019; 5.1.05 Belanja Hibah)	
2	I Gusti Agung Ayu Wahyuni, S.T., M.Si	Ketua Pokja Pemilihan 10	
3	I Md. Natalisto Desi Junior, S.E.	Anggota Pokja Pemilihan 10	
4	A.A. Gede Ari Sudana, S.Kom	Anggota Pokja Pemilihan 10	
5	Ni Kadek Dwi Rahayu, S.Ak	Anggota Pokja Pemilihan 10	
6	Ni Putu Sudyastini. S.E	Anggota Pokja Pemilihan 10	